

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 4 Januari 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (halaman 14)	Jumat, 4 Januari 2019	Infrastruktur Pertanian: Produktivitas diharapkan Naik	Pemerintah menyelesaikan pembangunan 65 waduk untuk memastikan ketersediaan air. Perbaikan 3 juta Hektar saluran irigasi primer sepanjang 2015-2019 disebut sudah rampung sementara dari target pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi, kini terbangun sekitar 700.000 hektar. Hal tersebut disampaikan presiden Joko Widodo saat meninjau perbaikan saluran irigasi Lodoyo dan pengerjaan pengendali banjir di Kali Bogel, Blitar. Awalnya, kata menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kapasitas air yang didistribusikan saluran irigasi Lodoyo 14 Meter kubik per detik. Namun akibat penyempitan, kapasitasnya tinggal 9 meter kubik/detik. Setelah perbaikan, kapasitas saluran irigasi kembali optimal yaitu 14 meter kubik/detik. Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan bahwa irigasi Lodoyo sangat membantu petani, khususnya di wilayah selatan. Sebelumnya hanya 1 tahun sekali panen, kini bisa 2 kali lebih panen dalam setahun.
2	Kompas (halaman 16)	Jumat, 4 Januari 2019	Infrastruktur: Perbaiki Jalan Ke danau Toba	Berbagai pihak mendorong perbaikan akses jalan menuju danau toba menyusul longsor yang terus terjadi di Jembatan Sidua-dua, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun (1 km dari Parapat). Longsor pertama kali terjadi pertengahan desember lalu. Hingga Kamis (3/1/2019) longsor terjadi lima kali, terakhir pukul 12.05. Buka tutup jalan dan pengalihan lalu lintas dilakukan petugas. akibatnya terjadi kemacetan parah di Kota Parapat dan sekitarnya. Jalan nasional itu merupakan satu-satunya akses ke Danau Toba dari Pematang Siantar-Medan.
3	Kompas (halaman 16)	Jumat, 4 Januari 2019	Berita Foto	Presiden Joko Widodo meninjau saluran irigasi Lodoyo di Kelurahan Jegu, Sutojayan, Kab. Blitar Jawa timur
4	Kompas (halaman 16)	Jumat, 4 Januari 2019	Infrastruktur: Lintas Bawah Yogyakarta Bertambah	Jalan lintas bawah (<i>underpass</i>) di Yogyakarta bertambah. Tahun 2019 jalan lintas bawah dibangun di simpang empat Kentungan, Sleman, DIY, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. PPK Jembatan Kretek II dan Uderpass Kentungan Cs Kementerian PUPR Sidik Hidayat mengatakan, pembangunan jalan lintas bawah itu berlangsung 14 Januari-31 Desember 2019. Nilai Proyeknya Rp. 126 miliar. "Jadwal pengerjaan tetap. Jika bisa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan itu harapan kami." Katanya di sleman (3/1/2019)
5	Media Indonesia (halaman 17)	Jumat, 4 Januari 2019	Tol Trans Jawa Gairahkan UKM	Kekhawatiran matinya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) setelah beroperasinya tol trans-Jawa tidak terbukti. Usaha batik di Pekalongan dan Batang tetap lancer meskipun tol Merak-Surabaya tersambung dan beroperasi akhir tahun ini. Para pengusaha batik Pekalongan

				dan Batang Jawa Tengah dapat berlega hati, masa liburan sekolah dan tahun baru telah selesai bersamaan dengan beroperasinya tol trans jawa. Sebelumnya mereka khawatir usaha akan roboh dengan beroperasinya tol tersebut.
6	Bisnis Indonesia (halaman 3)	Jumat, 4 Januari 2019	Pembangunan Infrastruktur: Sisten Siaga Bencana jadi Acuan	Pemerintah akan merevisi perencanaan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur di dalam negeri agar sejalan dengan sistem siaga bencana. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro menuturkan, revisi perencanaan pembangunan infrastruktur sangat dimungkinkan. "salah satunya kami ingin mengembangkan sistem siaga bencana, sehingga harus ada revisi untuk pinjaman multilateral dan bilateral" ujarnya, Kamis (3/1). Sebelumnya kepala Bappenas kerap menyuarakan rencana untuk memasukkan evaluasi risiko bencana ke dalam perencanaan infrastruktur. Hal itu didasari oleh posisi Indonesia yang dilalui jalur pegunungan (ring of fire). sehingga potensi bencana sangat besar. Di sisi lain, intensitas dan dampak bencana juga semakin besar akibat adanya perubahan iklim. Staf Khusus MEnteri PPN Eko Putri Adijayanto menambahkan sistem siaga bencana akan lebih mengacu spesifikasi teknis infrastruktur untuk menghadapi bencana.
7	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Jumat, 4 Januari 2019	Proyek Tol Semarang-Demak : Dokumen Penawaran Masuk Februari	Penyerahan dokumen penawaran pada lelang proyek jalan tol semarang-Demak direncanakan pada 11 Februari 2019, dan proses pemilihan pemenang diperkirakan bakal memakan waktu maksimal 1 bulan.
8	Bisnis Indonesia (halaman 20)	Jumat, 4 Januari 2019	Program Sejuta Rumah: Pengembang Harapkan Konsistensi Pemerintah	Dalam menyukseskan program sejuta rumah 2019, sejumlah pelaku usaha mengharapkan agar pemerintah konsisten dalam menentukan regulasi.

Judul	Infrastruktur Pertanian: Produktivitas diharapkan Naik	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 14)		
Resume	<p>Pemerintah menyelesaikan pembangunan 65 waduk untuk memastikan ketersediaan air. Perbaikan 3 juta Hektar saluran irigasi primer sepanjang 2015-2019 disebut sudah rampung sementara dari target pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi, kini terbangun sekitar 700.000 hektar. Hal tersebut disampaikan presiden Joko Widodo saat meninjau perbaikan saluran irigasi Lodoyo dan pengerjaan pengendali banjir di Kali Bogel, Blitar. Awalnya, kata menteri PUPR Basuki Hadimuljono, kapasitas air yang didistribusikan saluran irigasi Lodoyo 14 Meter kubik per detik. Namun akibat penyempitan, kapasitasnya tinggal 9 meter kubik/detik. Setelah perbaikan, kapasitas saluran irigasi kembali optimal yaitu 14 meter kubik/detik. Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan bahwa irigasi Lodoyo sangat membantu petani, khususnya di wilayah selatan. Sebelumnya hanya 1 tahun sekali panen, kini bisa 2 kali lebih panen dalam setahun.</p>		

INFRASTRUKTUR PERTANIAN

Produktivitas Diharapkan Naik

BLITAR, KOMPAS — Perbaikan saluran irigasi primer dan pembangunan pengendali banjir diharapkan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pemerintah juga menyelesaikan pembangunan 65 waduk untuk memastikan ketersediaan air.

Perbaikan 3 juta hektar saluran irigasi primer sepanjang 2015-2019 disebut sudah rampung. Sementara dari target pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi, kini terbangun sekitar 700.000 hektar. "Nanti (setelah) selesai semua, tentu air yang dibutuhkan sawah bisa disalurkan," kata Presiden Joko Widodo, se usai meninjau perbaikan saluran irigasi Lodoyo dan pengerjaan pengendali banjir di Kali Bogel, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019).

Awalnya, kata Menteri Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono,

kapasitas air yang didistribusikan saluran irigasi Lodoyo 14 meter kubik per detik. Namun, akibat penyempitan, kapasitasnya tinggal 9 meter kubik per detik sehingga mengurangi wilayah sawah yang bisa diairi.

Setidaknya 3.802 ha sawah milik 6.548 petani kekurangan air. Setelah perbaikan, kapasitas saluran irigasi kembali optimal, 14 meter kubik per detik.

Membantu petani

Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan, keberadaan irigasi Lodoyo sangat membantu petani, khususnya di wilayah selatan. Sebelum ada irigasi, lahan pertanian di Blitar selatan relatif kering atau satu tahun sekali tanam padi. Setelah ada saluran, kondisinya lebih subur dan bisa ditanami hingga dua kali atau lebih dalam setahun.

Sejauh ini, menurut Basuki,

perbaikan saluran irigasi yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sudah rampung. Namun, perbaikan saluran irigasi primer lain masih dikerjakan sehingga luasan saluran irigasi yang kembali optimal akan lebih dari 3 juta hektar.

Pembangunan pengendali banjir di Blitar juga terus dilanjutkan. Normalisasi Kali Bogel sepanjang 7,21 kilometer tersebut dimulai 2017 dan dijadwalkan rampung pada 2020. Biaya yang digunakan sekitar Rp 162,8 miliar.

Normalisasi Kali Bogel diharapkan mengatasi banjir yang kerap menggenangi permukiman dan sawah warga. Wilayah yang akan terlindungi banjir akan mencapai 500 hektar di Sutojayan, Kedungbunder, Desa Pandanarum, Bacem, dan Sumberejo. (INA/WER/NAD)

Judul	Infrastruktur: Perbaiki Jalan Ke danau Toba	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Berbagai pihak mendorong perbaikan akses jalan menuju danau toba menyusul longsor yang terus terjadi di Jembatan Sidua-dua, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun (1 km dari Parapat). Longsor pertama kali terjadi pertengahan desember lalu. Hingga Kamis (3/1/2019) longsor terjadi lima kali, terakhir pukul 12.05. Buka tutup jalan dan pengalihan lalu lintas dilakukan petugas. akibatnya terjadi kemacetan parah di Kota Parapat dan sekitarnya. Jalan nasional itu merupakan satu-satunya akses ke Danau Toba dari Pematang Siantar-Medan.		

INFRASTRUKTUR

Perbaiki Jalan ke Danau Toba

MEDAN, KOMPAS — Berbagai pihak mendorong perbaikan akses jalan menuju Danau Toba menyusul longsor yang terus terjadi di Jembatan Sidua-dua, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, sekitar 1 kilometer dari Parapat, Danau Toba. Longsor pertama terjadi pertengahan Desember lalu. Hingga Kamis (3/1/2019), longsor terjadi lima kali, terakhir pukul 12.05.

Buka tutup jalan dan pengalihan lalu lintas dilakukan petugas. Akibatnya, terjadi kemacetan parah di Kota Parapat dan sekitarnya. Jalan nasional itu merupakan satu-satunya akses ke Danau Toba dari Pematang Siantar dan Medan serta sebaliknya dari Danau Toba ke Pematang Siantar-Medan.

Kepala Kepolisian Sektor Parapat Ajun Komisaris Bambang Priyatno mengatakan, tanah longsor dari tebing menerjang aspal dan jembatan seperti air bah. Para petugas yang tengah menyingkirkan material longsor sebelumnya mendengar bunyi gemuruh dari atas dan segera menying-

Percepatan pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat perlu dilakukan.

kir. Arus lalu lintas juga dihentikan sehingga tidak ada korban.

Setelah situasi tenang, petugas kembali membersihkan material longsor. Jalan dibuka untuk satu jalur dari Parapat ke Pematang Siantar-Medan sekitar pukul 16.00. Jalan dilewati dengan sistem buka-tutup dengan arus dari Pematang Siantar-Parapat.

Menurut Bambang, longsor susulan bisa terjadi karena di kawasan bukit itu ada lima mata air.

Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan 9 yang meliputi daerah sekeliling Toba, Sarma Hutajulu, mengatakan, melihat kondisi jalan nasional akses satu-satunya ke Danau Toba dari Pematang Siantar itu, pihaknya mendorong agar

pembangunan jalan lintas alternatif dipercepat, seperti jalan dari Pondok Ulu, Simalungun menuju Parapat. "Apalagi Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi wisata dan kawasan strategis nasional," katanya. Percepatan pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat juga perlu dilakukan.

Selain Pematang Siantar-Parapat yang merupakan akses dari sisi timur-selatan Danau Toba, jalan Medan-Berastagi yang merupakan akses menuju Danau Toba sisi barat-utara juga rawan longsor. Sarma mendorong pemda, terutama Kabupaten Simalungun, mengonservasi perbukitan agar potensi longsor bisa diminimalkan.

Pegiat dari Jendela Toba, Mangaliat Simarmata, meminta pemerintah serius memperhatikan ekosistem penyangga Danau Toba.

"Jika kawasan Danau Toba mau dijadikan destinasi wisata internasional, harus ada perhatian khusus masalah ekosistem kawasan Danau Toba yang sudah rusak," kata Mangaliat. (WSI)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Presiden Joko Widodo meninjau saluran irigasi Lodoyo di Kelurahan Jegu, Sutojayan, Kab. Blitar Jawa timur		

Presiden Meninjau Saluran Irigasi

Presiden Joko Widodo meninjau saluran irigasi Lodoyo di Kelurahan Jegu, Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, se usai direhabilitasi, Kamis (3/1/2019). Saluran irigasi sepanjang 16,42 km itu mengairi 3.802 hektar sawah.



KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Judul	Infrastruktur: Lintas Bawah Yogyakarta Bertambah	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Kompas (halaman 16)		
Resume	Jalan lintas bawah (<i>underpass</i>) di Yogyakarta bertambah. Tahun 2019 jalan lintas bawah dibangun di simpang empat Kentungan, Sleman, DIY, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. PPK Jembatan Kretek II dan Uderpass Kentungan Cs Kementerian PUPR Sidik Hidayat mengatakan, pembangunan jalan lintas bawah itu berlangsung 14 Januari-31 Desember 2019. Nilai Proyeknya Rp. 126 miliar. "Jadwal pengerjaan tetap. Jika bisa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan itu harapan kami." Katanya di sleman (3/1/2019)		

INFRASTRUKTUR

Lintas Bawah Yogyakarta Bertambah

SLEMAN, KOMPAS — Jalan lintas bawah (*underpass*) di Yogyakarta, bertambah. Tahun 2019, jalan lintas bawah dibangun di simpang empat Kentungan, Sleman, DI Yogyakarta, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Pejabat Pembuat Komitmen Jembatan Kretek II dan Underpass Kentungan Cs Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sidik Hidayat mengatakan, pembangunan jalan lintas bawah itu berlangsung 14 Januari-31 Desember 2019. Nilai proyeknya Rp 126 miliar.

"Jadwal pengerjaan tetap. Jika bisa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan, itu harapan kami," katanya di Sleman, Kamis (3/1/2019).

Simpang empat Kentungan merupakan persimpangan antara Jalan Lingkar Utara dan

Jalan Kaliurang. Jalan Lingkar Utara dilintasi kendaraan dari arah barat ke timur dan sebaliknya, sedangkan Jalan Kaliurang dilintasi kendaraan dari utara ke selatan, begitu pula sebaliknya.

Sidik mengatakan, dengan jalan lintas bawah, kendaraan yang melintas tak perlu memperlambat laju karena tak lagi terhambat lampu lalu lintas.

Jalan Kaliurang tidak akan diubah ketinggiannya. Menurut rencana, jalan itu masih dilalui kendaraan dari utara-selatan dan selatan-utara, sama seperti sebelumnya. Perbedaannya, kali ini kepadatan berkurang karena kendaraan dari arah timur-barat dan barat-timur tidak menumpuk.

Panjang total jalan lintas bawah itu 540 meter. Bagian jalan yang tertutup atap atau yang berupa terowongan seki-

tar 180 meter. Adapun tinggi terowongan itu 5,8 meter. Ada dua arus lalu lintas yang masing-masing terdiri atas dua lajur jalan.

Secara terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pembangunan lintas bawah di simpang empat Kentungan memang dibutuhkan. Di sekitar simpang empat Kentungan kerap terjadi kemacetan karena kendaraan dari empat arah harus berjalan bergantian.

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Supto Raharjo menyatakan, selama pembangunan jalan lintas bawah di Kentungan, sejumlah jalur alternatif telah disiapkan. Saat pembangunan, pihaknya akan mengevaluasi rutin terkait pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan. (NCA/HRS)

Judul	Tol Trans Jawa Gairahkan UKM	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Media Indonesia (halaman 17)		
Resume	Kekhawatiran matinya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) setelah beroperasinya tol trans-Jawa tidak terbukti. Usaha batik di Pekalongan dan Batang tetap lancar meskipun tol Merak-Surabaya tersambung dan beroperasi akhir tahun ini. Para pengusaha batik Pekalongan dan Batang Jawa Tengah dapat berlega hati, masa liburan sekolah dan tahun baru telah selesai bersamaan dengan beroperasinya tol trans jawa. Sebelumnya mereka khawatir usaha akan roboh dengan beroperasinya tol tersebut.		

Tol Trans-Jawa Gairahkan UKM

KEKHAWATIRAN matinya usaha kecil dan menengah (UKM) setelah beroperasinya Tol Trans-Jawa tidak terbukti. Usaha batik di Pekalongan dan Batang tetap lancar meskipun Tol Merak-Surabaya telah tersambung dan beroperasi akhir tahun ini.

Para pengusaha batik Pekalongan dan Batang, Jawa Tengah, dapat berlega hati, masa liburan sekolah dan Tahun Baru telah usai bersamaan dengan beroperasinya Tol Trans-Jawa. Sebelumnya mereka khawatir usaha akan roboh seiring dengan beroperasinya tol tersebut.

Pasar Grosir Batik Setono di Kota Pekalongan pada masa arus mudik liburan sekolah tetap ramai dikunjungi para pemudik yang melintas. Kendati jumlah kendaraan yang melintas di jalur pantura berkurang 50% karena tersedot di tol yang diresmikan Presiden Jokowi pada Kamis (20/12/2018) lalu.

Bersamaan dengan dibukanya ruas tol itu, simpang susun tol Kota Pekalongan yang berada persis di depan Pasar Grosir Batik Setono menjadi pembuka jalan tetap lancarnya perniagaan batik. Buktinya pada masa liburan kemarin, pasar batik terbesar di pantura ini dibanjiri pengunjung. Omzet para pedagang batik melonjak. "Meski ada Tol Trans-Jawa sudah dibuka, perdagangan batik tetap lancar, bahkan omzet meningkat saat liburan Natal-Tahun Baru kemarin," kata Ketua Pedagang Grosir Setono Sony Hikmahul.

Selama musim liburan lalu, ujar Sony, terjadi lonjakan transaksi. Dalam sehari mereka dapat meraih omzet hingga Rp70 juta, sebelumnya omzet mereka Rp20 juta-Rp30 juta. Hal itu disebabkan pembukaan juga simpang susun tol sehingga para pemudik yang melintas di tol tetap dapat mampir ke pasar grosir batik untuk membeli oleh-oleh.

Hal itu diakui Kiki, 45, warga Bekasi, Jawa Barat, sepulang mudik dengan keluarga dari Semarang. Meskipun melintas di Tol Trans-Jawa, dia menyempatkan diri mampir ke Setono mencari batik atau oleh-oleh khas Pekalongan lainnya. Memborong batik di Pekalongan membawa kepuasan sendiri. "Sebab dapat harga miring dengan kualitas bagus jika dibandingkan dengan membeli di luar Pekalongan," kata Kiki.

Wali Kota Pekalongan Sa'elany Machfudz mengatakan bersamaan dengan pembangunan Tol Trans-Jawa, pengerjaan simpang susun itu merupakan komitmen untuk tetap menjaga perekonomian kota yang mengandalkan kerajinan dan seni batik tetap dapat hidup dan berkembang.

"Hasilnya saat ini terlihat. Meskipun ada Trans-Jawa, perdagangan batik di Kota Pekalongan tetap hidup dan ekonomi tetap menggeliat," kata Sa'elany.

Untuk tetap menghidupkan ekonomi rakyat, di ruas tol tersebut telah dibangun *rest area* yang memprioritaskan UKM. (Akhmad Safuan/N-3)

Judul	Pembangunan Infrastruktur: Sisten Siaga Bencana jadi Acuan	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 3)		
Resume	<p>Pemerintah akan merevisi perencanaan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur di dalam negeri agar sejalan dengan sistem siaga bencana. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S Brojonegoro menuturkan, revisi perencanaan pembangunan infrastruktur sangat dimungkinkan. "salah satunya kami ingin mengembangkan sistem siaga bencana, sehingga harus ada revisi untuk pinjaman multilateral dan bilateral" ujarnya, Kamis (3/1). Sebelumnya kepala Bappenas kerap menyuarakan rencana untuk memasukkan evaluasi risiko bencana ke dalam perencanaan infrastruktur. Hal itu didasari oleh posisi Indonesia yang dilalui jalur pegunungan (ring of fire). sehingga potensi bencana sangat besar. Di sisi lain, intensitas dan dampak bencana juga semakin besar akibat adanya perubahan iklim. Staf Khusus MEnteri PPN Eko Putri Adijayanto menambahkan sistem siaga bencana akan lebih mengacu spesifikasi teknis infrastruktur untuk menghadapi bencana.</p>		

► PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Sistem Siaga Bencana Jadi Acuan

JAKARTA — Pemerintah akan merevisi perencanaan pembangunan yang terkait dengan infrastruktur di dalam negeri agar sejalan dengan sistem siaga bencana.

Krizia Putri Kinanti & Hadijah Alaydrus
redaksi@bisnis.com

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan, revisi perencanaan pembangunan infrastruktur sangat dimungkinkan.

"Salah satunya kami ingin mengembangkan sistem siaga bencana, sehingga harus ada revisi untuk pinjaman multilateral dan bilateral," ujarnya, Kamis (3/1).

Sebelumnya, Kepala Bappenas kerap menyuarakan rencana untuk memasukkan evaluasi risiko bencana ke dalam perencanaan infrastruktur. Hal itu didasari oleh posisi Indonesia yang dilalui jalur pegunungan atau lebih dikenal dengan *ring of fire*, sehingga potensi bencana sangat besar.

Di sisi lain, intensitas dan dampak bencana juga semakin besar akibat adanya perubahan iklim.

Staf khusus Menteri PPN Eko Putri Adijayanto menambahkan pengembangan sistem siaga bencana akan lebih mengacu spesifikasi teknis infrastruktur untuk menghadapi bencana.

Misalnya, kekuatan struktur dari infrastruktur, kondisi tanah atau daerah tempat infrastruktur dibangun dengan melihat struktur tanah (rentan likuifaksi atau daerah patahan).

"Perencanaan pembangunan infrastruktur akan didesain untuk lebih siaga bencana mengingat Indonesia adalah negara dalam *pacific ring of fire* yang memang rawan bencana," ujar Eko yang juga CEO Unit Tim Fasilitas PINA.

Dia menegaskan perencanaan harus disesuaikan dengan sumber pendanaan, termasuk pinjaman dan lain sebagainya. Yang jelas pengembangan infrastruktur berbasis siaga bencana dapat memanfaatkan varian pembiayaan alternatif seperti

Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari data Bappenas per Oktober 2018, proyek KBPU yang sudah sampai tahapan transaksi mencapai 11 proyek senilai US\$4,39 miliar.

Max Antameng, Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), mengungkapkan rencana revisi pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar siaga bencana bisa dilakukan.

Namun, revisi terakhir pembangunan infrastruktur yang terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) sudah dituangkan dalam Perpres 56/2018.

Menurut Max, PSN sudah memiliki amdal dan studi kelayakan yang lengkap. "Feasibility study mengakomodasi mitigasi bencana di dalam pemilihan rute atau lokasi."

Keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kian nyata. Setahun terakhir Indonesia mengalami rentetan bencana mulai dari gempa Lombok, gempa Palu-Donggala hingga tsunami di Selat Sunda.

Kementerian Keuangan bakal menambah anggaran untuk bencana alam di APBN 2019. Sayangnya, jumlah peningkatannya belum disampaikan secara jelas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani membenarkan adanya peningkatan pagu anggaran tersebut dan berapapun kebutuhannya siap dipenuhi. "Insyaallah bisa, kita buktikan 2019 ini berapapun kebutuhan bisa kita penuhi."

Dari data Kemenkeu sampai dengan 23 November 2018, pemerintah mengalokasikan pagu cadangan bencana pada 2018 sebesar Rp6,65 triliun dengan realisasi Rp5,05 triliun.

Namun akibat bencana di NTB dan

7 Proyek PINA 2017-2018

Pengembangan infrastruktur berbasis siaga bencana dapat memanfaatkan varian pembiayaan alternatif seperti Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA).

► **BIJB Kertajati Airport**
Nilai proyek: US\$69,7 juta
Instrumen: *Limited Participation Mutual Funds*

► **Nusantara Infrastruktur**
Nilai proyek: US\$134 juta
Instrumen: *Equity financing*

► **Fiber Optic Cables PT Len Industri**
Nilai proyek: US\$13 juta
Instrumen: *Equity financing*

► **Pembangkit Listrik PT PP Energi**
Nilai proyek: US\$74 juta
Instrumen: *Perpetuity notes phase I*

► **Investment Fund PT Sarana Multi Infrastruktur**
Nilai proyek: US\$11 juta
Instrumen: *Obligasi syariah*

► **Jalan Tol PT Waskita Toll Road**
Nilai proyek: US\$256 juta
Instrumen: *Equity financing*

► **PT PLN (Persero)**
Nilai proyek: US\$11 juta
Instrumen: *Obligasi syariah*

Sumber: Pina Center

BISNIS/RAJITYO/EXO

Palu, Kemenkeu menerima usulan tambahan Rp2,25 triliun, baik dana *on call*, stimulan bantuan perbaikan rumah dan usulan BNPB. Kebutuhan ini ditambah oleh perkiraan hingga akhir tahun sebesar Rp650 miliar.

Dari total kebutuhan tambahan, tersebut sisa anggaran hanya menutupi Rp1,6 triliun. Alhasil, perkiraan kekurangan pagu anggaran Rp1,30 triliun. Dimintai pendapatnya, Wakil Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Erika Ferdinata mengatakan pilhaknya hanya mengikuti apa yang direncanakan oleh pemerintah dan pemberi kerja.

"Menurut saya itu lebih baik, jadi kami buat suatu produk itu pertama adalah tahan lama. Kedua itu aman."

Dengan demikian, lanjutnya, juga dapat menyelamatkan banyak orang dari ancaman bencana seperti gempa yang umumnya menelan banyak korban. **B**

Judul	Proyek Tol Semarang-Demak : Dokumen Penawaran Masuk Februari	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Penyerahan dokumen penawaran pada lelang proyek jalan tol Semarang-Demak direncanakan pada 11 Februari 2019, dan proses pemilihan pemenang diperkirakan bakal memakan waktu maksimal 1 bulan.		

► PROYEK JALAN TOL SEMARANG-DEMAK

Dokumen Penawaran Masuk Februari

SEMARANG—Penyerahan dokumen penawaran pada lelang proyek jalan tol Semarang—Demak direncanakan pada 11 Februari 2019, dan proses pemilihan pemenang diperkirakan bakal memakan waktu maksimal 1 bulan.

Kepala Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Eka Pria Anas mengatakan, sejumlah syarat agar proyek tersebut bisa dilelang di antaranya penetapan lokasi, persetujuan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *feasibility study*, dan analisis mengenai dampak lingkungan sudah terpenuhi.

"Belum [pemenang lelang]. Pemasukan dokumen penawaran rencananya 11 Februari 2019," kata Eka kepada *Bisnis*, Kamis (3/1)

Dia menjelaskan, proses pemilihan pemenang lelang membutuhkan waktu 1 bulan setelah dokumen penawaran masuk secara keseluruhan.

Akan tetapi, lanjutnya, proses tersebut bisa lebih lama dari 1 bulan jika terdapat proses sengketa dari peserta lelang. Proses sengketa, menurutnya, dapat terjadi ketika terdapat peserta yang tidak puas dengan keputusan panitia.

"Satu bulan maksimal, tetapi, nanti ada juga proses sengketa. Jika itu terjadi bisa lebih lama," katanya.

Dia menambahkan, peserta lelang yang ikut dalam proyek jalan tol Semarang—Demak harus lulus kualifikasi dari sudut pengalaman dan ketersediaan dana. Adapun nilai proyek tersebut berada pada kisaran Rp15 triliun.

Dalam catatan *Bisnis*, proyek tol Semarang—Demak merupakan proyek inisiasi pemerintah atau *solicited project*.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, pembangunan jalan tol Semarang—Demak akan segera terlaksana pada 2019. Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan sekaligus untuk mengatasi rob dan banjir.

"Saat ini untuk tol Semarang—Demak baru tahap penetapan lokasi, mudah-mudahan pada 2019 mendatang jalan tol dapat segera dibangun untuk menanggulangi rob dan banjir," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono menjelaskan, lahan yang dibutuhkan untuk jalan tol tersebut mencapai 535 hektare.

Sebagian lahan di daratan, lanjutnya, akan diganti untung oleh pemerintah. Namun lahan yang berada di pesisir pantai tidak akan diganti.

"Kami juga ada pembebasan lahan milik masyarakat. Kalau [lahan] yang di laut itu dikuasai negara, tinggal memberi patok saja," kata Sri beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dia menambahkan lelang penyusunan *detailed engineering design* (DED) jalan Tol Semarang—Demak seksi I telah selesai dengan pemenang PT Adhiyasa Desicon.

Dalam perkembangan lain, dilaporkan, tingkat hunian hotel di Jateng pada Desember 2018 cukup tinggi sampai 94%. Capaian tersebut naik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang hanya 91%.

Menurut Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Benk Mintosih beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat hunian ini adalah infrastruktur jalan tol yang sudah menyambungkan Kota Semarang dengan berbagai daerah. Bukan hanya itu, banyaknya destinasi wisata baru di Jateng yang dibuka oleh pemerintah.

(k28/Yudi Supriyanto)

Judul	Program Sejuta Rumah: Pengembang Harapkan Konsistensi Pemerintah	Tanggal	Jumat, 4 Januari 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 20)		
Resume	Dalam menyukseskan program sejuta rumah 2019, sejumlah pelaku usaha mengharapkan agar pemerintah konsisten dalam menentukan regulasi.		

► PROGRAM SEJUTA RUMAH

Pengembang Harapkan Konsistensi Pemerintah

JAKARTA — Dalam menyukseskan program satu juta rumah 2019, sejumlah pelaku usaha mengharapkan agar pemerintah konsisten dalam menentukan regulasi.

Sekjen DPP Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lucida meminta supaya peraturan rumah subsidi tidak berubah-ubah sehingga keterlambatan realisasi satu juta rumah tidak terulang pada tahun ini.

“Harapannya peraturan jangan berubah-ubah, seperti tahun lalu, misalnya, tiba-tiba pemerintah mengubah spesifikasi konstruksi gedung dari besi 10 menjadi 8. Yang sudah terbangun realisasinya belum jelas sehingga baru bisa terealisasi bulan April sehingga terlambat 3 bulan,” kata Totok kepada *Bisnis*, Rabu (2/1).

REI memasang target yang tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Dia menyebutkan bahwa asosiasi pengembang itu akan menambah target hingga 250.000 untuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan catatan *Bisnis*, per November 2018, REI baru mengantongi pembangunan hunian MBR sebanyak 200.000 unit dari komitmen sebanyak 230.000 unit.

Totok menilai kendala lainnya bagi hunian MBR adalah semakin rumitnya persyaratan.

Dia mengatakan bahwa persyaratan yang awalnya hanya tujuh lembar, sekarang harus dilampirkan persyaratan sebanyak 21 lembar.

“Bukan hanya tambah sulit, juga

menambah biaya. Tambahan biaya berat bagi rumah MBR. Jika ada perubahan semuanya sebaiknya didiskusikan sejak awal dengan asosiasi, kami semua asosiasi kan siap,” jelas dia.

Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali menyebutkan bahwa saat ini pengembang masih menunggu pemerintah mengeluarkan batasan harga rumah subsidi 2019.

Jika pada akhir Januari ini dikeluarkan, para pengembang juga masih harus menunggu keluarnya peraturan Menteri Keuangan.

Padahal, pihaknya telah meminta batasan harga agar dipercepat keluar. Karena batasan harga rumah berlaku 5 tahun, dia juga mengharapkan supaya pemerintah bisa menerapkan peraturan lainnya agar bisa berlaku untuk 5 tahun ke depan sehingga tidak ada perubahan yang dilakukan berulang-ulang.

Hingga batasan harga rumah subsidi keluar, Junaidi mengatakan bahwa pengembang sudah menyiapkan strategi yaitu dengan mengejut penjualan produk-produk yang ada dari 2018.

Selain itu, Daniel juga menyampaikan bahwa kendala-kendala klasik membangun hunian dapat teratasi, seperti perizinan.

Dia menilai program *Online Single Submission* yang baru dikeluarkan pemerintah dapat berjalan baik karena belum semua daerah bisa melaksanakan OSS. *(Maria Elena)*